

## RESOLUSI KONFLIK ETNIK SAMAWA DAN ETNIK BALI DI SUMBAWA

*Syaifuddin Iskandar*

### Abstract

*This study aims to understand the background of conflict between Samawa ethnic and Balinese that still undercover for more than 25 years. The objective of this study are to explore the background of Balinese movement to Sumbawa, to identify the underlying causes of conflict between Samawa ethnic and Balinese and to address the conflict resolution that had been applied. The study applied qualitative approach. This study reported that the motivation of Balinese moved to Sumbawa were to increased their standard of live. Domination of the Balinese in social, economic, political and cultural aspects became the underlying factors of conflict between Balinese and Samawanes. Community based conflict resolution were applied through involving the community leaders from both side in coordination process and increased cultural communication for the shake of harmony and tolerance among society in Kabupaten Sumbawa.*

**Keywords:** *factors, resolution, conflict, ethnic*

### Pendahuluan

Masyarakat Sumbawa termasuk kategori masyarakat majemuk yang dihuni oleh berbagai macam etnik, termasuk warga etnik Bali. Kehadiran etnik Bali di Kabupaten Sumbawa dilatarbelakangi beberapa faktor, di antaranya adalah migrasi, transmigrasi, dan terdesak kondisi ekonomi dan geografis di daerah asal. Ada pula yang dengan motivasi ingin merantau, meningkatkan taraf hidup, mencari kerja, menjadi petani, peternak, pedagang/bisnis, bahkan mutasi jabatan pegawai dan pejabat.

Dalam kurun waktu 10 tahun (1970-1980) etnik Bali berhasil unggul dalam mengakses sumber-sumber ekonomi dan jabatan-jabatan penting di birokrasi (pemerintahan/swasta/BUMN). Lambat laun keberadaan etnik Bali membawa warna tersendiri dalam kehidupan masyarakat Sumbawa. Warga etnik Bali mulai

menampilkan perilaku dan aktivitas adat/budaya Bali yang dianggap mencolok oleh warga etnik Samawa. Semua kondisi tersebut akhirnya menjadi penyebab konflik antara etnik Samawa dengan etnik Bali yang puncaknya terjadi pada 17 November 1980.

Secara teoretis, sumber dan faktor penyebab konflik antaretnik yang hidup dalam masyarakat majemuk biasanya dipicu adanya benturan kepentingan maupun karena perbedaan paham, ideologi, adat istiadat, agama, kepentingan sosial ekonomi, sosial politik, dan budaya. Atau dalam lingkup yang lebih luas adalah karena adanya "benturan budaya" (Huntington, 1996) yang biasanya melekat dengan agama yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kesemuanya ini sangat mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat yang paling hakiki.

<sup>1</sup> Lektor Kepala, Dosen Kopertis Wil. VIII, Dpk pada Univ. Samawa Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat.

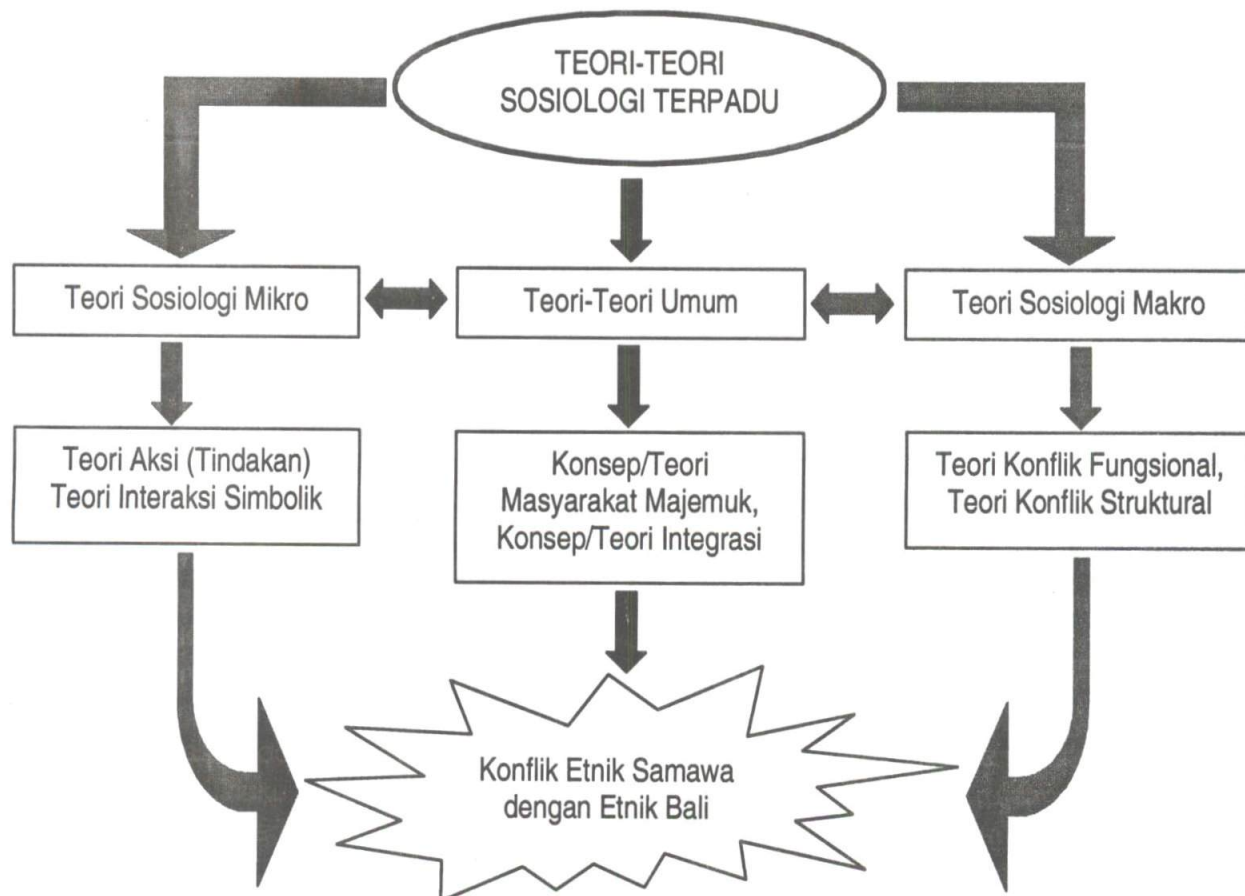
Konteks masyarakat Indonesia yang bhinneka tunggal ika memiliki keanekaragaman etnik dan kebudayaan. Dengan ini seharusnya dikembangkan sistem budaya fundamental koordinatif dengan memegang teguh konsep Pancasila, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan, bendera nasional, hukum nasional, sistem politik nasional, dan sistem pendidikan nasional (Suparlan, 2002). Semua hal ini perlu ditumbuhkembangkan demi kesatuan dan persatuan bangsa.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena di lapangan, dapat dirumuskan fokus dan tujuan penelitian sebagai berikut. (1) Mengetahui latar belakang kehadiran etnik Bali di Kabupaten Sumbawa, (2) faktor-faktor penyebab konflik etnik Samawa dengan etnik Bali, dan (3) upaya mengatasi (resolusi) konflik etnik Samawa dengan etnik Bali pasca konflik.

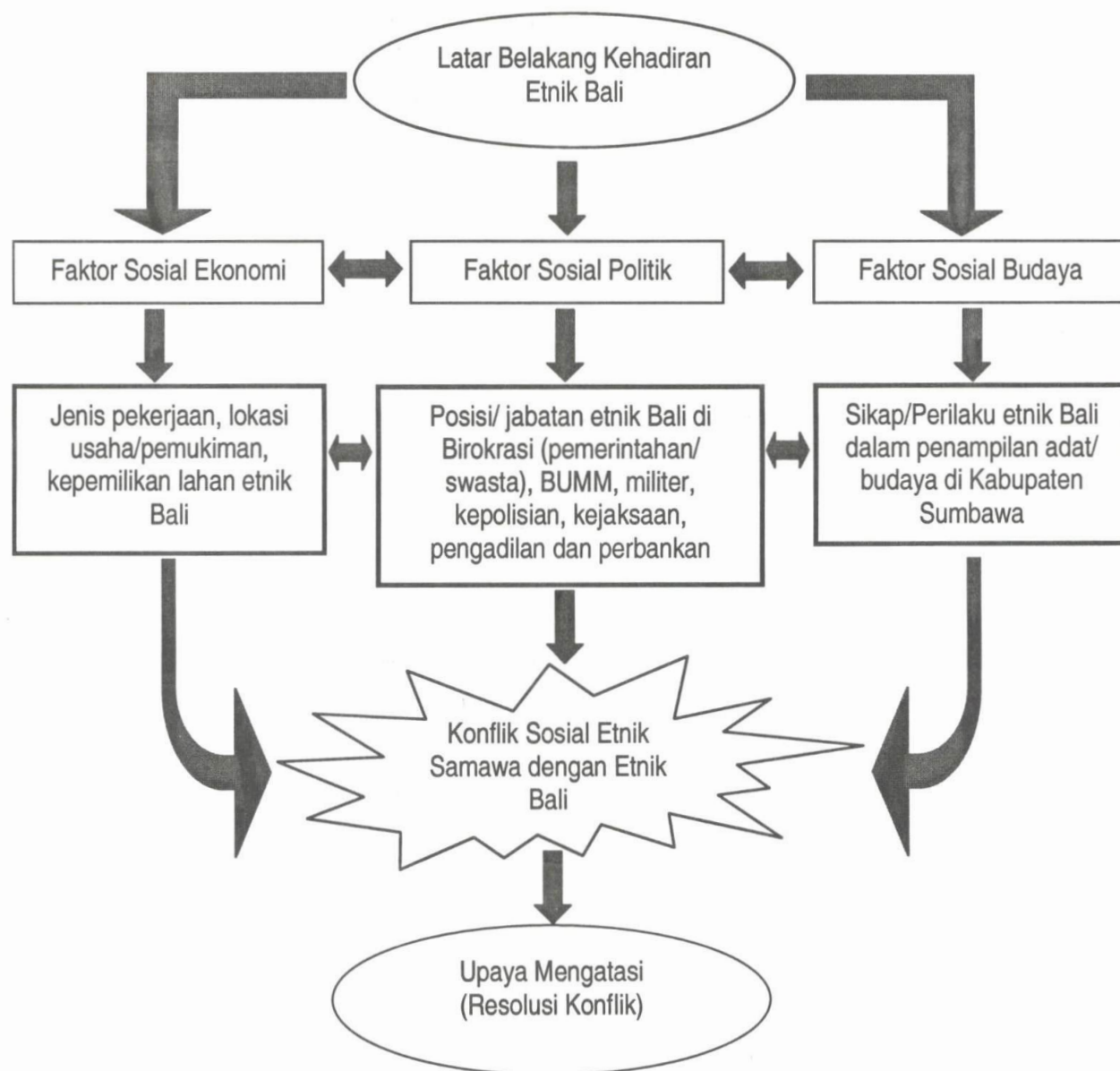
Dalam upaya mengkaji dan menjawab tujuan penelitian yang berkaitan dengan fenomena konflik etnik Samawa dengan etnik Bali tersebut, digunakan kerangka analisis atau teori kerja menurut paradigma sosiologi terpadu (Ritzer, 2002). Kerangka tersebut terdiri dari perpaduan antara teori sosiologi makro dan teori sosiologi mikro. Adapun teori yang termasuk dalam mashab sosiologi makro, antara lain, adalah teori fungsional struktural (Durkheim, Parsons) dan teori konflik (Dahrendorf, Coser, Simmel) dan yang termasuk ke dalam mashab teori sosiologi mikro adalah teori tindakan/aksi (Weber, Cooley, Parsons) dan teori interaksi simbolik (Blumer, Mead). Di samping teori-teori tersebut, digunakan pula beberapa konsep dan teori-teori umum yang relevan dengan masalah penelitian.

Berbagai konsep/teori yang termasuk dalam paradigma sosiologi terpadu ini digunakan

**Skema 1**  
**Kerangka Teori Penelitian**



Skema 2  
Kerangka Satuan Pengamatan terhadap Peristiwa Konflik Etnik Samawa dengan Etnik Bali

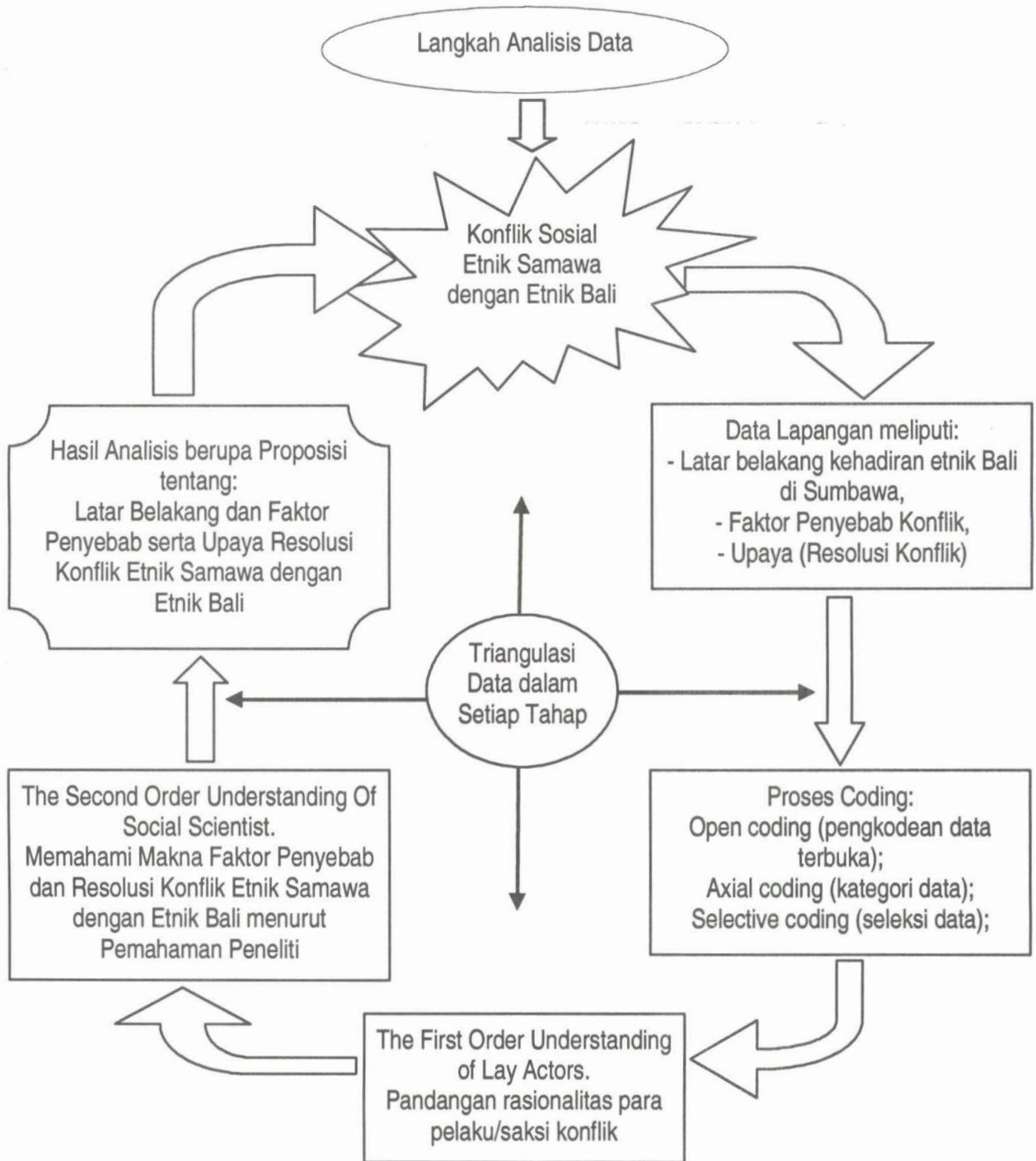


mengingat fenomena konflik tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif dengan berstandar pada paradigma sosiologi terpadu (Ritzer, 1992). Paradigma ini meletakkan intinya pada hubungan antara empat tingkat realitas sosial, yaitu (1) makro-objektif, seperti masyarakat, hukum, birokrasi, bahasa, dan simbol-simbol, (2) makro-subjektif, seperti kultur, nilai-nilai, dan norma-norma, (3) mikro-objektif, seperti bentuk-bentuk interaksi sosial dan pola

tingkah laku: kerja sama, persaingan, dan konflik; serta (4) mikro-subjektif, yaitu berbagai konstruksi sosial masyarakat tentang realitas konflik, seperti proses berpikir, menginterpretasi, dan memahami peristiwa konflik menurut konstruksi sosial masyarakat Sumbawa.

Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Skema 1 dan Skema 2. Data yang diperoleh di lapangan dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dilakukan secara simultan, mulai dari

**Skema 3**  
**Kerangka Analisis Data menurut Teori Grounded**



pengumpulan data, reduksi data, komparasi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Selama pengumpulan data, dilakukan pengodean data secara terbuka (*open coding*) untuk merinci, menguji, membandingkan, mengembangkan konsep, dan kategorisasi. Beberapa kategori (data) penting

selanjutnya diberi kode khusus (*axial coding*) untuk menentukan hubungan dan kesesuaian antarkategori untuk kemudian dipadukan menjadi proposisi-proposisi yang perlu dikembangkan. Selanjutnya dilakukan seleksi data (*selective coding*) untuk menyusun kategori inti (*core category*) secara sistematis

yang dikaitkan dengan kategori-kategori lainnya sehingga menjadi proposisi sebagai temuan penelitian (Skema 3).

### **Analisis Data dan Pembahasan**

Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif *grounded theory*, selanjutnya data yang berkaitan dengan fokus penelitian dianalisis dan dibahas dengan berbagai konsep/teori sebagai berikut.

#### **a. Latar Belakang Kehadiran Etnik Bali Di Sumbawa**

Latar belakang kehadiran etnik Bali di Kabupaten Sumbawa erat kaitannya dengan proses transmigrasi dan migrasi antarsuku bangsa. Proses migrasi dan transmigrasi yang terjadi sejak periode tahun 1970-1980 cukup membawa dampak positif dan kemajuan bagi warga pendatang. Para transmigran yang berasal dari Bali diberikan hak menguasai lahan di Kecamatan Lunyuk, Torano/Empang, Plampang, Utan Rhee, Seteluk, Sekongkang, dan juga di beberapa kawasan lainnya di Kabupaten Sumbawa. Selain kehadiran warga Bali melalui program transmigrasi, mereka juga datang secara perorangan maupun berkelompok karena alasan ekonomi, menjadi petani, pedagang atau karena mutasi jabatan bagi pegawai negeri sipil. Dengan modal tekad dan kerja keras, perlahan tetapi pasti etnik Bali terus berkembang, baik dalam jumlah maupun dalam jenis usaha. Khususnya keberadaan etnik Bali di Kota Sumbawa, sejak periode 1970-1980, mereka mulai menguasai tempat-tempat permukiman yang terbilang strategis di sekitar Kota Sumbawa. Mereka menggunakan daerah-daerah itu untuk tempat tinggal, hotel, toko, kios-kios di pasar, lahan pertanian. Kebijakan pemerintah pusat kemudian menguatkan penempatan warga etnis Bali untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan maupun di lembaga-lembaga keuangan, BUMN, dan sebagainya.

Kehadiran etnik Bali ini pun terjadi juga di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia tidak hanya di Kabupaten Sumbawa. Menurut Suwarsih (2002), dalam sejarah Indonesia,

sejak sebelum tahun 1930-an telah terjadi mobilitas penduduk dan kontak antarsuku bangsa di berbagai tempat di seluruh nusantara. Mobilitas penduduk dalam bentuk migrasi maupun melalui program transmigrasi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru sejak tahun 1970-an telah membawa perubahan yang cukup mendasar dalam kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di tanah air. Mochtar Naim (1976) mencoba membuat perkiraan statistik tentang perkembangan migrasi di antara kelompok-kelompok suku bangsa di Indonesia dari tahun 1930-1961. Dari sana dapat disimpulkan bahwa kecenderungan migrasi pada umumnya terjadi sejak tahun 1970, kecuali intensitas migrasi di daerah Minangkabau yang meningkat secara cepat dalam jangka waktu 30 tahun. Salah satu contohnya adalah daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan tempat bertemunya banyak suku bangsa sebagai akibat migrasi dan transmigrasi.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi. Sejak zaman kemerdekaan daerah ini sebenarnya telah dihuni oleh berbagai macam etnik/suku bangsa dan sejak periode tahun 1970-1980 secara bergelombang mulai kedatangan para transmigran yang berasal dari Pulau Jawa, Lombok, dan juga Bali. Bukan itu saja, migran dari berbagai daerah dan suku bangsa juga banyak berdatangan, seperti dari etnik Tionghoa, Sunda, Banjar, Bugis Makasar, Mbojo Bima, Madura, Minang Sumatera, Sumba, Timor, dan Arab.

Secara nasional, sebenarnya kontak antargolongan etnik di Indonesia sudah berlangsung sebelum tahun 1930 (*Volkstelling*, Vol. VIII, 1930: 94-95). Secara umum, faktor pendorong kedatangan para migran tersebut karena ingin mencari pekerjaan, memperbaiki taraf kehidupan, berdagang, menjadi buruh tani, ikut keluarga, dan mutasi jabatan di pemerintahan/swasta. Faktor daya tarik migrasi adalah karena luasnya potensi yang dimiliki Sumbawa sehingga secara ekonomis diperhitungkan akan dapat menampung dan

memenuhi kebutuhan para migran maupun warga transmigrasi. Dalam teori sejarah migrasi terjadi karena keterdesakan suatu penduduk oleh kekerasan alam atau manusia lain sehingga mereka mencari tempat permukiman lain yang aman untuk kelangsungan hidupnya.

Hasil penelitian Mc Andrew & Rahardjo (1982) menunjukkan program transmigrasi maupun migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lain telah mengakibatkan konflik antaretnik pendatang dengan penduduk asli. Persoalannya selalu terkait dengan hak milik tanah yang semakin langka, keseimbangan ekologis daerah perdesaan yang semakin kritis, dan benturan budaya yang kuat antara penduduk asli dengan para pendatang. Hasil studi tersebut menunjukkan faktor budaya menjadi bagian penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan. Motif ekonomi memang akan menciptakan integrasi atas kepentingan yang saling menguntungkan, namun dalam kasus transmigrasi di Sumatera misalnya, konflik yang terjadi di sana sini ternyata disebabkan oleh masalah hak milik tanah dan kesenjangan perbedaan cara bertani. Demikian pula contoh kasus dalam proses interaksi dan adaptasi budaya Bali yang beragama Hindu di Desa Parigi Sulawesi Tengah yang penduduknya beragama Islam. Di sini orang Bali tetap leluasa memegang adat istiadatnya, melaksanakan upacara keagamaan, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan adat dan budaya lainnya. Orang Bali di tempat asing tetap memiliki ikatan dengan leluhurnya yang sebagian diperlihatkan dengan pandangan merendahkan kebiasaan masyarakat setempat (Mc Andrew & Rahardjo, 1982).

Kecenderungan untuk melestarikan budaya leluhur juga diperlihatkan oleh transmigran Bali di Kalimantan Tengah. Meskipun hanya dibatasi oleh parit dengan permukiman penduduk asli Dayak Ngaju, etnik Bali ini tetap menampilkan dan mempertahankan budayanya secara utuh. Dalam berinteraksi dengan penduduk asli tidak sampai terjadi ketegangan budaya karena

kedua model kebudayaan pendatang dan kebudayaan lokal yang umumnya petani berjalan secara seimbang dan masing-masing saling memberi dalam batas-batas cara bertani (Rusli Lutan, 2001). Realitas ini mendukung tesis yang menyatakan daerah yang suku pendatang dan penduduk aslinya berorientasi/hidup pada sektor pertanian akan kecil potensi konflik di antara mereka karena mereka berorientasi pada nilai budaya petani yang menekankan harmonisasi dengan alam dan lingkungannya.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sumbawa tentunya berbeda dengan lingkungan daerah transmigran lainnya. Kabupaten Sumbawa dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam dan spesialisasi pekerjaan yang heterogen, mulai dari pegawai, petani, pedagang, peternak, nelayan, sampai pengusaha, cukup memberi nuansa yang dinamis dalam kehidupan masyarakatnya. Kabupaten Sumbawa mempunyai luas wilayah darat 8.493 km<sup>2</sup> dan wilayah laut 4912,46 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 452.746 jiwa (laki-laki 228.717 jiwa dan perempuan 224.029 jiwa). Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah penduduk asli (etnik Samawa) mencapai 68,66 persen dan selebihnya adalah berasal dari etnik Bali, Sasak (Lombok), Jawa, Sunda, Madura, Mbojo (Bima/Dompu), Bugis Makasar, Minang, Sumba/Timor, dan Arab (BPS Sumbawa, 2002).

Secara geografis, Kabupaten Sumbawa terletak pada posisi yang cukup strategis, yaitu berada pada segi tiga emas kawasan pariwisata antara Pulau Bali, Lombok, dan Pulau Komodo. Kabupaten Sumbawa juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup potensial berupa lahan pertanian dan peternakan serta telah ditetapkannya daerah ini sebagai lumbung padi dan daerah pengembangan ternak di NTB. Di samping itu, juga terdapat kekayaan hutan, flora dan fauna, mineral, pertambangan emas dan tembaga, industri, serta sumber daya kelautan dengan panjang pantai mencapai 900 km (BPS Sumbawa, 2002).

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, Kabupaten Sumbawa dengan luas wilayah dua kali Pulau Lombok atau Pulau Bali, terbilang

berpenduduk jarang dengan tingkat kepadatan rata-rata 52 jiwa/km. Atas dasar itu, Kabupaten Sumbawa sejak periode tahun 1970-1980 menjadi daerah tujuan transmigrasi yang membuka peluang kepada para transmigran maupun para migran yang berasal dari berbagai daerah terus berdatangan. Kabupaten Sumbawa dengan daya tarik yang begitu kuat, baik untuk daerah transmigrasi, tempat tinggal, tempat berusaha, maupun membuka lahan pertanian, yang dipandang sebagai "rumah masa depan" yang sangat menjanjikan bagi setiap orang. Terlebih lagi dengan kenyataan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir daerah ini dikenal sebagai tempat investasi perusahaan tambang emas dan tembaga.

### **b. Faktor Penyebab Konflik**

Berdasarkan temuan penelitian, faktor penyebab konflik etnik Samawa dengan etnik Bali dapat dikelompokkan menjadi (1) faktor sosial ekonomi, (2) faktor sosial politik, dan (3) faktor sosial budaya. Faktor-faktor tersebut pada saat itu tampaknya didominasi oleh etnik Bali. Keberhasilan etnik Bali di bidang ekonomi maupun dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan/swasta semakin memengaruhi pola perilaku dan aktivitas keseharian etnik Bali dalam penampilan adat/budaya yang kental diwarnai oleh adat istiadat dan budaya yang melekat dengan agama Hindu yang mereka anut. Segala kebiasaan dan tata cara adat tersebut mulai ditampilkan secara terbuka di tengah-tengah kehidupan masyarakat Sumbawa yang mayoritas beragama Islam. Misalnya dalam kegiatan upacara adat di tengah kota, dirangkai dengan acara-acara seremonial, seperti sabung ayam dan main kartu, minuman keras, pembakaran mayat (*ngaben*) di pura dalam kota, dan kawin lari. Sikap dan perilaku etnik Bali di tingkat warga tersebut erat kaitannya dengan dukungan dan dominasi orang Bali yang menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan maupun di BUMN. Semua itu dirasakan oleh penduduk asli sangat tidak adil dan mengganggu adat istiadat dan budaya mereka.

Sehubungan dengan fenomena tersebut, secara teoretis perlu dipahami bahwa pada dasarnya setiap kelompok etnik memiliki banyak perbedaan, baik dalam pandangan hidup (*world view*) dan budaya, termasuk agama dan ideologi yang mereka anut. Ini disebut ruang privasi etnisitas (*primate domain*). Jika nilai-nilai privasi ini ditarik dan dibuka ke tingkat publik (*public domain*), maka akan tampak perbedaan-perbedaan mendasar antara tiap-tiap kelompok etnik. Apabila perbedaan ini semakin dipertajam, konflik pasti terjadi. Secara umum, konflik antaretnik ini terjadi akibat watak privasi etnisitas yang terlalu mencolok sehingga terjadilah benturan etnisitas (budaya). Etnik pribumi umumnya memandang negatif (*negative prejudice*) terhadap watak dan perilaku (budaya) etnik pendatang (apalagi didukung oleh adanya perbedaan agama). Proses ini kemudian melahirkan penyakit sosial yang dikenal dengan *ethnocentrism*, yang artinya sikap satu kelompok etnik yang memandang nilai budaya, institusi, dan sistem kepercayaan mereka lebih benar atau lebih tinggi derajatnya daripada yang dimiliki kelompok etnik lain. Sikap etnosentrisme ini semakin berbahaya jika diikuti oleh pandangan stereotipe dan prasangka terhadap kelompok etnik lain.

Etnosentrisme tidak muncul dengan sendirinya, tetapi ditopang oleh persaingan dan perbedaan aksesibilitas terhadap kekuasaan. Konsep ini dalam kenyataannya pernah terjadi di Amerika Serikat antara etnik kulit putih dan kulit hitam. Ini juga yang terjadi di Kalimantan maupun di tempat-tempat lain, dengan terjadi persaingan antara pendatang dengan tuan rumah, terutama terjadi persaingan di bidang ekonomi dan dalam pembagian kekuasaan yang lebih banyak dimenangkan oleh kaum pendatang (Rofiq, 2002).

Berikut ini akan dibahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik etnik Samawa dengan etnik Bali.

#### **1. Faktor Sosial Ekonomi**

Faktor penyebab konflik yang terkait dengan aspek sosial ekonomi adalah karena dominasi

etnik Bali dalam bidang pertanian, perdagangan, kepemilikan lahan pertanian, permukiman, rumah, toko, kios di tempat-tempat strategis, di pasar, dan di sekitar jalan raya. Hal ini didukung oleh elite-elite kekuasaan yang dominan dijabat oleh etnik Bali sehingga etnik Bali sangat mudah mendapatkan akses ekonomi, seperti meminjam kredit di bank serta kepemilikan lahan permukiman, lahan pertanian, tempat usaha, dan kios di pasar. Akibatnya warga etnik Samawa merasa terdesak dalam beberapa mata pencaharian dan lapangan kerja.

Menurut Kusnadi (2002), konflik di bidang ekonomi adalah konflik yang disebabkan oleh adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak-pihak yang berkonflik. Berbagai indikator faktor ekonomi tersebut ternyata memberi andil dalam peristiwa konflik etnik Samawa merasakan adanya ketidakadilan dan kekecewaan. Hal ini dapat dipahami karena tempat berjualan/kios-kios di pasar banyak dimiliki oleh etnik Bali, termasuk lahan-lahan permukiman/pertanian di tempat-tempat strategis lainnya. Menyempitnya ruang usaha/lapangan kerja maupun areal permukiman dan pertanian tampaknya dirasakan warga etnik Samawa telah mengurangi ruang gerak maupun penghasilan mereka sehari-hari. Keterdesakan dalam hal mata pencaharian dan lapangan kerja yang berdampak pada berkurangnya penghasilan masyarakat setempat tidak hanya menimbulkan kerugian secara materi, tetapi juga menyebabkan etnik Samawa merasa kehilangan identitas dan harga diri.

Ketidakadilan dan kompetisi yang kurang adil dalam bidang ekonomi seperti telah disebut di atas secara perlahan-lahan dianggap oleh penduduk setempat sebagai proses pengambilalihan/pemindahan lapangan kerja maupun asset ekonomi dari tangan etnik Samawa kepada warga etnik Bali. Hal ini diperparah dengan sikap kurang membaurnya warga etnik Bali dengan anggota komunitas setempat dalam satu permukiman. Tampaknya kondisi ini juga semakin mempersulit terciptanya interaksi sosial yang serasi di antara mereka.

Warga etnik Samawa menyatakan pada dasarnya mereka tidak berkeberatan dengan proses migrasi maupun program transmigrasi yang dilancarkan oleh pemerintah pusat. Mereka menginginkan kebijakan pemerintah dalam pemberian lahan garapan kepada warga transmigrasi dapat dibatasi dan juga mengikutsertakan warga setempat secara adil melalui program transmigrasi lokal. Di samping itu, dalam penentuan daerah transmigrasi atau permukiman lainnya diharapkan mengikutsertakan masyarakat setempat melalui pemerintah daerah dan kecamatan beserta tokoh masyarakat yang ada. Aparatur pmda kabupaten dan kecamatan seharusnya mengadakan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah penempatan warga transmigran agar dibaur dengan warga trans lokal sehingga pola kerja maupun pola budaya masing-masing kelompok dapat diterima/diadopsi oleh kelompok lain. Hal ini penting karena sebagaimana dipahami budaya kerja warga pendatang biasanya lebih unggul dari pada warga setempat, baik secara kultur maupun secara ekonomi.

Di sisi lain, keberhasilan etnik Bali di Kabupaten Sumbawa sesungguhnya juga dipengaruhi oleh motivasi, semangat kerja, dan ketekunan mereka dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya beserta keluarganya. Pada akhirnya mereka mampu membeli tanah pertanian maupun tanah tegalan untuk tempat tinggal, tempat usaha, tempat peribadatan, serta melaksanakan persembahyangan secara tekun. Dari berbagai pandangan (hasil interviu dan kompilasi data), dapat dipahami bahwa keberhasilan warga Bali di Kabupaten Sumbawa bukanlah semata-mata karena banyaknya pejabat yang menduduki jabatan penting di birokrasi. Namun dalam faktanya etnik Bali memang memiliki etos kerja yang lebih baik dibandingkan dengan warga etnik Samawa di samping adanya bantuan modal oleh keluarganya yang ada di Bali.



## 2. Faktor Sosial Politik

Faktor penyebab konflik terkait aspek sosial politik adalah karena dominasi etnik Bali dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, swasta, dan BUMN. Secara teoretis, menurut Kusnadi (2002), konflik di bidang sosial politik adalah konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan individu/kelompok di bidang sosial politik dan/atau kekuasaan dari pihak yang berkonflik. Dalam konteks konflik etnik Samawa dengan etnik Bali, faktor penyebab konflik terkait aspek sosial politik ini adalah karena keberhasilan etnik Bali dalam menduduki jabatan-jabatan penting di birokrasi (pemerintahan/swasta/BUMN).

Dominasi warga etnik Bali dalam menduduki jabatan-jabatan strategis tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat. Menurut Syamsuddin (2002:10-13), pola kebijakan pusat di masa Orde Baru menimbulkan beberapa konsekuensi logis bagi daerah sebagai berikut. (1) Hubungan pusat dan daerah yang sentralistis, (2) pejabat-pejabat yang akan menduduki jabatan-jabatan teras dan strategis dikirim atau didrop dari pusat, serta (3) munculnya dan meningkatnya kemiskinan struktural. Semua ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecemburuan sosial yang berlarut-larut bagi masyarakat di daerah-daerah. Kondisi ini masih juga dirasakan sampai sekarang, dalam era reformasi dan otonomi daerah seharusnya pemerintah pusat sudah memberi kesempatan kepada daerah untuk berkreasi secara mandiri.

Puncak dari ketidakpedulian dan dominasi pusat terhadap hak-hak masyarakat di daerah dapat dilihat paling tidak dari dua hal berikut. (1) Pejabat yang akan menduduki jabatan teras dan strategis, seperti muspida di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, gubernur, bupati, kepala dinas, bahkan kanwil dan kandep, sebagian besar dikirim/didrop dari pusat. (2) Hancurnya tata nilai dan tradisi adat masyarakat setempat karena kurangnya komitmen dan rasa memiliki para pejabat yang didrop dari pusat serta ketidakberdayaan masyarakat setempat untuk

melawan dan menyuarakan hak-haknya karena kuatnya tekanan dari pemerintah waktu itu.

Dalam konteks konflik karena perebutan sumber-sumber kekuasaan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa waktu itu, pejabat-pejabat Sumbawa dominan dipegang oleh etnik Bali yang beragama Hindu. Faktor ini kemudian memunculkan skenario bahwa Sumbawa harus dibuat kacau. Sasarannya adalah etnik Bali dan sasaran kambing hitamnya adalah para elite kader pemimpin Sumbawa yang dikorbankan seolah-olah sebagai sutradara pelaku.

Dalam realitasnya setelah dilaksanakan pemilihan bupati baru, ternyata bupati yang terpilih pasca konflik berasal dari kalangan ABRI. Sedangkan sang aktor yang dari awal dicurigai ingin menjadi Bupati Sumbawa ternyata tidak pernah dicalonkan oleh partai mana pun. Kecurigaan terhadap ABRI waktu itu berhasil ditepis oleh sang bupati terpilih yang dengan usaha dan kerja keras ternyata berhasil membangun Kabupaten Sumbawa secara signifikan. Beberapa pendapat mengatakan sang bupati yang baru ternyata berhasil membangun Kabupaten Sumbawa, baik pembangunan di bidang fisik, nonfisik maupun dalam bidang keamanan yang waktu itu relatif stabil.

## 3. Faktor Sosial Budaya

Faktor penyebab konflik terkait dengan aspek sosial budaya adalah karena penampilan adat/budaya/agama Hindu Bali yang sangat terbuka. Ini didukung oleh elite-elite kekuasaan yang dominan dijabat oleh etnik Bali sehingga dalam kehidupan sehari-hari etnik Bali begitu mudah mendapatkan akses. Misalnya dalam pelaksanaan upacara adat, seperti *ngaben* dan prosesi upacara keagamaan lainnya, yang selalu diiringi arak-arakan keliling kota, judi, dan minuman keras, belum lagi arogansi pemuda Bali dan adanya kawin lari dengan gadis Samawa yang sering terjadi sepanjang tahun. Semua ini dianggap oleh etnik Samawa telah melampaui batas-batas tradisi, adat, dan agama Islam yang mayoritas dianut oleh etnik Samawa.

Menurut Kusnadi (2002), faktor penyebab konflik di bidang sosial budaya adalah konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan paham dan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Konflik etnik Samawa dengan etnik Bali pada aspek sosial budaya ini adalah karena adanya benturan budaya antarkedua etnik. Warga etnik Bali sebagai pendatang di Kabupaten Sumbawa mempunyai kebiasaan, perilaku, dan penampilan adat istiadat dan budaya yang melekat dengan agama Hindu yang dianut. Namun ada juga tradisi yang sering kali dikacaukan dengan adat/budaya Bali yang sering dilakukan oleh sekelompok warga Bali, yaitu kebiasaan sabung ayam sambil judi, minum/jual arak, iring-iringan dalam pelaksanaan prosesi upacara adat, dan kawin lari yang menurut warga etnik Samawa telah melampaui batas-batas tradisi, adat, dan agama Islam yang mayoritas mereka anut.

Secara umum, faktor sosial budaya ini dianggap sebagai faktor dominan yang memperluas konflik etnik Samawa dengan etnik Bali. Hal ini dapat diidentifikasi dari beberapa indikator yang ikut memengaruhi sebagai berikut. (1) Melibatkan media identifikasi etnik yang bersifat keagamaan (*ethnic-religio identification*), (2) karakter gerakan sosial, (3) hubungan antara sikap keagamaan dengan pandangan terhadap eksistensi sumber daya alam dan terhadap martabat manusia, dan (4) adanya kesenjangan antara sistem nilai budaya yang dianut dengan realitas kehidupan masyarakat setempat (Atmaja, 2002).

Yang berkaitan dengan media identifikasi kedua etnik yang bersifat keagamaan ternyata memberikan kontribusi yang cukup besar dalam peristiwa konflik di Kabupaten Sumbawa. Dalam penampilan identitas fisik maupun nonfisik, etnik Bali berbeda dengan etnik Samawa, termasuk dalam menentukan ciri kelompoknya masing-masing, yaitu dalam pengakuan sosial mereka masing-masing memiliki perbedaan dalam nilai-nilai budaya, termasuk nilai-nilai keagamaan dan bahasa (Narroll, 1964; Barth, 1969). Identifikasi diri etnik Samawa ini menjadi meluas diikuti oleh

kelompok etnik lain yang merasa memiliki kepentingan dan agama yang sama, yaitu Islam. Di sisi lain warga etnik Bali yang diidentifikasi sebagai non-Islam dianggap sebagai kelompok luar (*out group*) dan ancaman bagi mereka. Islam dalam hal ini dimanfaatkan sebagai media identifikasi yang secara langsung maupun tidak langsung telah mampu "menarik dan memengaruhi" emosi massa secara meluas dan dianggap sebagai wadah/ruang budaya yang efektif bagi anggota kelompok etnik lain yang merasa Islam ikut membaaur dalam gerakan amuk massa tanpa dapat dikenal identitasnya secara jelas. Faktor sosial budaya dengan memunculkan identifikasi berdasarkan etnik-keagamaan (*tekhnoreligio identification*) ini secara bersama-sama membentuk pola pertikaian/konflik dengan meningkatnya rasa solidaritas dan kesadaran dalam kelompok etnik Samawa.

Terkait dengan kehidupan etnik Bali di Kabupaten Sumbawa, hampir semua prosesi adat/budaya Bali berkaitan langsung dengan ajaran agama Hindu yang mereka anut. Dalam hal ini terjadinya apa yang disebut benturan budaya dengan masyarakat setempat (etnik Samawa), yang kemudian memunculkan segi-segi agama di dalamnya. Namun perlu pula dipahami, menurut ajaran agama Hindu, segala aktivitas yang berkaitan dengan ritual upacara keagamaan itu merupakan manifestasi dari perintah agama yang mereka anut. Dengan demikian, dapat dipahami adanya pelaksanaan berbagai upacara ritual yang dilakukan oleh umat Hindu Bali erat kaitannya dengan fungsi dan peran warga umat Hindu yang hidup dalam komunitas desa adat yang sangat menonjol. Desa adat ini membawahi beberapa banjar adat. Pola hubungan banjar adat dengan desa adat bersifat struktural dan fungsional, namun dalam konteks tertentu kadangkala masih sukar dibedakan.

Menurut Atmaja (2003), perbedaan kultur dan agama dapat pula menimbulkan pemaknaan yang berbeda mengenai sesuatu, misalnya tentang ruang, seperti yang terjadi di Desa Bayu Poh. Pada saat desa ini dibentuk oleh kaum

migran dari Jawa, Madura, Bugis dan Bali, mereka sepakat melokasikan kuburan Hindu dan Islam pada areal yang sama. Namun kuburan Islam yang terletak di pinggir sungai disfungsi karena terkikis air banjir yang berlangsung pada setiap musim hujan. Sebagai gantinya, mereka membangun kuburan pada sebidang tanah tegalan wakaf yang berlokasi di tengah permukiman. Ketika kuburan itu hendak dipakai, liang telah digali, orang Bali melarangnya karena dianggap menyalahi tata ruang yang berlandaskan pada suprastruktur ideologi yang mereka miliki, yakni *Tri Angga* dan patokan *luan-lehen*. Apabila gagasan ini dilanggar, mereka yakin desa adat akan *leteh* sehingga terjadilah marabahaya. Umat Islam tentu saja tidak memercayainya karena agama yang mereka anut tidak memberlakukan tata ruang seperti yang dikenal oleh umat Hindu. Akibatnya timbul konflik antara umat Hindu dan Islam. Kemunculan konflik ini memang berintikan pada masalah kuburan, namun keterlibatan faktor agama sebagai sarana bertindak maupun sebagai kerangka berpikir dalam konteks pemberian makna terhadap sesuatu tidak bisa diabaikan. Sampai saat ini kebutuhan umat Islam akan kuburan yang terbebas dari bahaya banjir belum terpenuhi dan ternyata masalah kuburan berpotensi sebagai sumber konflik pada masyarakat Desa Banyu Poh.

Keberadaan etnik Bali di Kabupaten Sumbawa sebenarnya telah berlangsung lama dan pola interaksi dengan masyarakat setempat berjalan secara harmonis. Bahkan tidak lama berselang setelah terjadinya konflik 17 November 1980, warga Bali sudah mulai menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat setempat dengan cara meninggalkan tradisi/kebiasaan yang tidak berhubungan langsung dengan ajaran agamanya. Mereka juga dapat menekan atau mengalihkan berbagai prosesi adat, seperti *ngaben*, ke tempat yang agak jauh dari pusat kota.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang berkaitan dengan latar belakang kehadiran etnik Bali di Sumbawa serta faktor-faktor

penyebab konflik etnik Samawa dengan etnik Bali, dapat dirumuskan proposisi sebagai berikut.

“Etnik pendatang cenderung lebih unggul dalam mengakses sumber-sumber ekonomi dan jabatan-jabatan penting di birokrasi. Mereka sebagai pendatang memiliki semangat, motivasi, etos kerja yang tinggi untuk berprestasi dan meningkatkan taraf hidup, sedangkan masyarakat setempat cenderung lamban karena merasa memiliki dan dimanjakan oleh alam lingkungannya”.

### c. Cara Mengatasi (Resolusi) Konflik

Resolusi konflik yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah upaya untuk membangun hubungan baru dan bertahan lama di antara kelompok etnik Samawa dengan etnik Bali yang pernah berkonflik dengan mengacu pada berbagai strategi penanganan konflik yang berbasis komunitas etnik. Tujuannya adalah mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri konflik maupun mencari formula baru karena masih adanya berbagai perbedaan pemahaman terhadap sumber dan penyebab konflik. Dengan kata lain, resolusi konflik adalah upaya pengelolaan keharmonisan hubungan di antara kelompok etnik yang pernah berkonflik.

Ada beberapa upaya resolusi konflik berbasis komunitas antara etnik Samawa dengan etnik Bali yang ditempuh oleh berbagai kalangan pasca konflik, antara lain sebagai berikut. (1) Rapat koordinasi di tingkat muspida dengan melibatkan berbagai tokoh etnik yang ada di Sumbawa, khususnya dari etnik Bali dalam rangka meredam konflik yang lebih luas. (2) Meningkatkan intensitas komunikasi antaretnik dan golongan dalam upaya mengantisipasi isu-isu yang sifatnya provokatif. (3) Menindak tegas para pelaku dan otak kerusuhan melalui upaya mencari, menahan/menangkap, dan menghukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Menghimbau kepada etnik Bali agar tetap tenang, sabar, dan untuk masa-masa yang akan datang dapat meninjau kembali pola penampilan adat/budaya yang tidak sesuai dengan tradisi/

adat/budaya orang Sumbawa. (5) Memberikan bantuan santunan untuk kebutuhan hidup sehari-hari kepada etnik Bali yang mengalami kerugian harta benda maupun jiwa.

Menurut Kartono (1994), setiap masyarakat perlu mengembangkan manajemen resolusi konflik. Yang dimaksud manajemen resolusi konflik adalah strategi penanggulangan konflik yang tidak saja mencakup apresiasi terhadap konflik yang berwujud perilaku menerima perbedaan dan keanekaragaman, tetapi juga menstimulasinya dan menyelesaikannya guna mewujudkan perbaikan-perbaikan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup suatu sistem sosial.

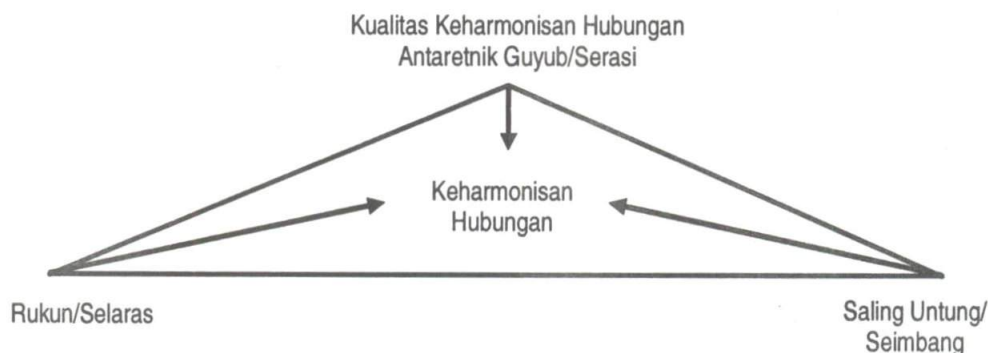
Penerapan manajemen resolusi konflik berkaitan dengan pemahaman tentang sumber konflik. Konflik dapat saja bersumber pada perebutan sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, prestise, dan/atau sumber daya kekuasaan. Khusus untuk sumber daya kekuasaan, sumber daya ini berbaur dengan dualisme kultural yang tercermin dari pemberlakuan paham ke-kita-an dan ke-mereka-an yang diperkuat dengan etnosentrisme, fanatisme agama, dan elemen kultural yang lainnya, baik sebagai penguat identitas etnik maupun pelegitimasi konflik. Namun di sisi lain, walaupun ada sumber konflik, mereka belum tentu berkonflik, melainkan dapat saja berintegrasi (bersatu).

Menurut Sjamsuddin (1996), proses integrasi yang ideal pada masyarakat Indonesia yang multietnik adalah yang bercorak bhineka tunggal

ika, multikultural, atau pluralistik. Pencapaian sasaran itu memerlukan persyaratan, yakni mereka yang berbeda kepentingan, tujuan, agama, maupun etnisitas yang hidup dalam ruang dan waktu yang sama harus mampu mengembangkan iklim sosial yang akomodatif, kooperatif, bertoleransi terhadap perbedaan, dan disertai dengan kemampuan beradaptasi terhadap kebudayaan dominan. Hal ini sebagaimana yang tercermin dari adanya fasih bahasa dan fasih budaya. Pencapaian sasaran ini tidak dapat pula dilepaskan dari komponen-komponen dasar sistem sosiokultural yang berlaku dalam masyarakat, yang di dalamnya mencakup kesepakatan mereka akan sistem budaya fundamental koordinatif, ketersediaan kelompok sosial yang menyilang dan memotong, serta pola kehidupan yang berkomplementer.

Kearifan lokal juga tidak dapat diabaikan dan perlu dihormati sepanjang itu memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Misalnya masyarakat Sumbawa mengenal nilai *adat rapang tanah Samawa* (adat istiadat tanah Samawa) atau dikenal juga slogan *senap semu nyaman nyawe* (sejuk, aman, dan damai). Masyarakat Bali juga memiliki ideologi *tri hita karana*, semboyan *desa-kala-patra*, *linggih manul sesana* dan *sesana manut linggih*, ajaran *suvadharma*, dan lain-lain, yang kesemuanya sangat menekankan pada keharmonisan dan kerukunan hidup antarsesama. Untuk itu, diperlukan sarana kontrol sosial agar kelompok masyarakat tidak berpetualang dengan konflik, yakni budaya malu dan budaya takut. (Geertz, 1983; Magnis-Suseno, 2000). Aneka bentuk kearifan lokal itu

Skema 4  
Kualitas Keharmonisan Hubungan Antaretnik



memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai resep bertindak agar manusia tidak suka berkonflik. Sebaliknya, mereka berusaha mewujudkan keharmonisan dengan cara bertindak sesuai dengan status dan peranannya dalam suatu kehidupan sosial budaya yang pluralistik.

Secara teoretis, keharmonisan hubungan antaretnik dapat diartikan sebagai kondisi kehidupan bersama antarkelompok etnik yang dinamis, guyub/selaras, rukun/serasi, dan saling menguntungkan/seimbang (Hartoyo, 2004:77-78). Kualitas keharmonisan hubungan antaretnik dapat dilihat pada Skema 4.

Skema 4 kemudian dikaitkan dengan pola hubungan antara etnik Samawa dengan etnik Bali sebelum konflik dan bahkan pasca konflik setelah keadaan menjadi normal. Dapat dikatakan secara lahiriah tampak suatu pola kehidupan yang guyub/serasi dalam kehidupan interaksional sehari-hari, seperti dalam aktivitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan, dengan saling mengunjungi, saling bertamu, saling memberi. Semuanya mengarah pada hubungan positif (peningkatan kualitas hubungan), saling untung, seimbang, dan hidup dalam kerukunan dan keselarasan.

Sebagai implementasi nyata dari konsep/teori di atas, dapat dilakukan pembentukan kelompok sosial antaretnik yang menyilang dan memotong atau pola kehidupan yang berkomplementer. Hal itu dapat dilakukan melalui pembentukan forum komunikasi antarbudaya sebagai sarana penyampaian informasi budaya masing-masing dalam rangka memelihara saling pengertian dan toleransi.

Berkenaan dengan itu, sebaiknya masyarakat Sumbawa mengembangkan manajemen resolusi konflik berbasis komunitas. Seperti disebutkan oleh Giddens (1999), manajemen resolusi konflik berbasis komunitas merupakan energi lokal yang sangat bermanfaat bagi penanggulangan konflik, baik secara preventif maupun kuratif. Penerapan manajemen konflik berbasis komunitas tetap tidak dapat dilepaskan dari kesepakatan akan sistem budaya fundamental koordinatif yang bersumber pada budaya nasional, agama, dan

kearifan lokal yang antara lain menekankan pada nilai-nilai universal, seperti toleransi dan solidaritas sosial kasih sayang. Namun apa yang ideal secara tekstual belum tentu memadai secara kontekstual karena masih adanya kendala yang bersumber pada paham ke-kitaan dan ke-mereka-an, politik *othering*, *etnosentrisme eksklusivisme* keagamaan, dan fundamentalisme agama. Oleh karena itu, konflik antaretnik maupun antaragama, baik yang bersifat konflik laten maupun konflik terbuka masih tetap sulit dihindari.

Dalam hal ini, tujuan resolusi konflik adalah tetap memelihara persatuan dan integrasi antar etnik. Upaya integrasi ini dalam rangka mempertemukan kepentingan antarkelompok yang pernah bertikai agar di masa-masa yang akan datang tetap dapat menjalin harmonisasi secara bersama-sama dalam menjalankan aktivitas keagamaan, kegiatan ekonomi, perkawinan, pendidikan, hidup berkeluarga, dan bertetangga. semua hal itu perlu didasarkan pada sikap toleransi antarsesama etnik, golongan, maupun agama. Selain itu, hubungan yang sifatnya sementara dalam membangun hidup bermasyarakat juga perlu dibangun melalui kegiatan saling bertamu, makan bersama, saling menawarkan, dan tolong-menolong dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan. Wadah yang diperlukan untuk memelihara hubungan yang harmonis dapat melalui pembentukan forum komunikasi lintas etnik/agama sehingga komunikasi budaya antaretnik dapat berlangsung secara efektif.

Dalam upaya terus membangun hubungan yang harmonis dan integrasi antaretnik, perlu dikemukakan beberapa konsepsi tentang pentingnya integrasi bangsa dalam masyarakat yang majemuk. Untuk mencapai keseimbangan (integrasi) dalam suatu masyarakat, Parsons (1981) menunjukkan empat prasyarat yang disingkat AGIL. (1) *Adaptation*, yaitu sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. (2) *Goal attainment*, yaitu setiap sistem harus memiliki alat untuk memobilisasi sumber daya supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. (3) *Integration*, yaitu sistem harus

mempertahankan koordinasi dan kesatuan secara internal dalam setiap bagian dan membangun cara-cara untuk mengatasi gangguan. (4) *Latent* atau *pattern maintenance*, yaitu setiap sistem sedapat mungkin harus mempertahankan dirinya dalam keadaan yang seimbang dan harmonis.

Pentingnya masalah integrasi tersebut bukanlah berbicara masalah pengintegrasian keturunan asing semata, melainkan masalah pengintegrasian seluruh penduduk pribumi untuk menjadi anggota nation Indonesia. Adapun ciri-ciri suatu *nation* adalah adanya kebudayaan, bahasa, identitas sendiri, serta perasaan solidaritas di antara sesama warga bangsa. Hasil penelitian Bruner (1972) menunjukkan bangsa Indonesia jarang sekali berbicara soal suku bangsa bila mereka sedang berada di antara orang-orang dari suku bangsa lain, namun mereka sering kali mempercakapkan suku bangsanya sendiri. Jadi salah satu masalah serius yang dihadapi Indonesia sebagai bangsa multietnik adalah masalah integrasi nasional. Ekspresi rasa kesukubangsaan tampaknya masih sering menimbulkan ketegangan dalam hubungan antarsuku bangsa sehingga persepsi sosial, stereotipe etnik, dan sikap antargolongan etnik masih memegang peranan penting dalam memelihara tingkah laku antar golongan etnik di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa cara mengatasi (resolusi) konflik etnik Samawa dengan etnik Bali pasca konflik adalah melalui penerapan manajemen konflik berbasis komunitas. Perlu dilakukan koordinasi dengan melibatkan berbagai tokoh etnik yang ada di Sumbawa, meningkatkan komunikasi budaya antara etnik Samawa dengan etnik Bali agar tetap menjalin hubungan yang harmonis dan toleransi antaretnik/umat yang hidup di Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan berbagai pembahasan di atas, dapat dirumuskan proposisi yang berkaitan dengan cara mengatasi (resolusi konflik) etnik Samawa dengan etnik Bali sebagai berikut.

“Apabila kelompok etnik saling memiliki kesadaran dan sikap positif antara satu

dengan yang lainnya, hubungan antaretnik cenderung diwarnai oleh rasa keguyuban, kerukunan, dan saling menguatkan. Sebaliknya, semakin ada prasangka negatif antaretnik yang ditandai dengan adanya jarak hubungan kurang akrab, kurang intim, dan mencari kesalahan orang lain, cenderung menghasilkan hubungan yang saling merugikan”.

## Penutup

Latar belakang dan motivasi kehadiran etnik Bali di Kabupaten Sumbawa adalah karena keterdesakan ekonomi dan geografis di daerah asal dengan motivasi ingin merantau dan meningkatkan taraf hidup. Faktor penyebab konflik adalah karena adanya dominasi etnik Bali dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya etnik Samawa, yaitu dalam hal mengakses sumber-sumber ekonomi, jabatan-jabatan penting di birokrasi (pemerintahan, swasta, BUMM), serta adanya perilaku dan penampilan adat/budaya Bali yang dianggap mencolok oleh etnik Samawa. Cara mengatasi (resolusi) konflik adalah dengan mengembangkan manajemen konflik berbasis komunitas melalui koordinasi dengan melibatkan berbagai tokoh etnik Samawa dan etnik Bali yang ada di Sumbawa. Perlu ditingkatkan pula komunikasi budaya untuk tetap menjalin hubungan yang harmonis dan saling pengertian/toleransi antaretnik/umat yang hidup di Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut. Masyarakat Sumbawa mengharapkan adanya teladan elite yang benar-benar arif, bijaksana, dan menyejukkan. Oleh karena itu, segenap elite penguasa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama kiranya dapat memberikan teladan yang positif dalam berperilaku dan tetap mengampanyekan pentingnya toleransi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Warga etnik Samawa kiranya dapat menjaga dan memelihara hubungan yang positif dengan etnik Bali dengan cara memahami dan menghargai adat/tradisi yang dimiliki dan ditampilkan oleh etnik Bali (yang positif). Etnik

Bali telah menjadi bagian dari masyarakat Sumbawa dan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam mengembangkan berbagai potensi Sumbawa di bidang ekonomi, pertanian, maupun bidang-bidang lainnya.

Warga etnik Bali kiranya dapat belajar dari pengalaman pahit peristiwa konflik masa lalu yang telah banyak memakan korban moral maupun material. Oleh karena itu, segala kebiasaan negatif yang tidak berkaitan langsung dengan ritual keagamaan kiranya dapat ditinggalkan demi citra diri dan nama besar Bali di mata masyarakat Sumbawa, bahkan di mata dunia.

Hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan dan keberadaan etnik Samawa maupun etnik Bali serta etnik lainnya yang hidup di Kabupaten Sumbawa yang multietnik. Dengan demikian, dapat mendukung hubungan (interaksi) yang harmonis bagi setiap etnik yang tinggal dan hidup di Kabupaten Sumbawa.

Pola kebijakan yang perlu dikembangkan, antara lain, adalah pengaturan dan pembagian lokasi lahan transmigrasi maupun lahan usaha yang ada di pusat kota. Semuanya agar dapat diatur secara adil dengan penduduk setempat. Diperlukan pengaturan pola permukiman dan pembauran tempat tinggal antara para pendatang (warga Bali) dengan penduduk setempat. Warga etnis Bali perlu diberikan izin lokasi tempat peribadatan yang representatif. Warga etnik Bali juga perlu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Penempatan pejabat bagi warga pendatang sebaiknya dilakukan secara proporsional dan profesional serta adanya penegakan hukum yang tegas bagi setiap warga masyarakat yang melanggar dan melakukan kekerasan akibat konflik.

#### Daftar Pustaka

Ahmad, Rofiq. 2002. *Budaya Kepeloporan dalam Mobilitas Penduduk*. Jakarta: Kerja sama Penerbit Puspaswara dengan Deptrans dan PPH.

Atmadja, N. B. 2002. *Manajemen Konflik pada Masyarakat Desa Adat Multietnik di Kabupaten Buleleng Bali*. Singaraja: M.M.S.K., IKIP Negeri Singaraja

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa. 2002. *Sumbawa Dalam Angka*. Sumbawa Besar: BPS dan Bappeda Kab. Dati II Sumbawa.

Bart, Frederick. 1969. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: Indonesia University Press.

Bruner, Edward M. 1972. *The Expression of Ethnicity in Indonesia*, in A. Cohen, ed. *Urbanethnicity*. London: Ravistock.

Depdikbud. 1977/1978. *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya.

Giddens, Anthony. 1999. *Beyond Left and Right, Tarian "Idiologi Alternatif" di atas Pusara Sosialisme dan Kapitalisme*. Yogyakarta: Penerbit IRCISoD.

Haris. Syamsuddin. 2002. *Otonomi Daerah, Demokratisasi dan Pendekatan Alternatif Resolusi Konflik Pusat Daerah*. Semarang: Makalah Kongres AIPI.

Hartoyo. 2004. *Konflik dan Keharmonisan Hubungan Antara Etnik Asli Lampung dengan Etnik Pendatang Dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat Lampung Pasca Orde Baru*, Makalah Seminar Internasional ke-3, Salatiga: Yayasan PERCIK.

Huntington, Paul T. 1996. *The Clash Of Civilization And Remarking Of World Order*. New York: Simon and Schuster.

Kusnadi, H. HMA. 2002. *Masalah, Kerjasama, Konflik dan Kinerja: Kontemporer & Islam*. Malang: Penerbit Taroda.

Lutan, Rusli. 2001. *Keniscayaan Pluralitas Budaya Daerah: Analisis Dampak Sistem Nilai Budaya Terhadap Eksistensi Bangsa*. Bandung: Angkasa.

MacAndrew, Colin and Rahardjo, Ed. 1982. *Pemukiman di Asia Tenggara dan Transmigrasi di Indonesia: Suatu*

- Perbandingan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Miall, Hygh Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.
- Pelly, Usman. 1994. *Interaksi Antar Suku Bangsa dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Depdikbud R. I.
- Ritzer, George. 2002. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Penyardur: Alimandan. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali Pers.
- Suparlan, Parsudi. 2002. "Konflik sosial dan alternatif pencegahannya", *Antropologi Indonesia, Journal of Social and Cultural Anthropology*, 13(59): 1-5.
- Suseno, Frans Magnis. 2000. *Mencari Makna Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Warnaen, Suwarsih, 2002. *Stereotip Etnik dalam Masyarakat Multietnik*. Yogyakarta: Mata Bangsa Kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.